

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 20
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 14 September 2023
Waktu : 10.35 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas Penyesuaian RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), dan Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B. (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 30 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal);
3. Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak., CSFA. (Inspektur Jenderal);
4. Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya);
5. Dr. Budi Sulistiyo, M.Si. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan);

6. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H. (Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut);
7. Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan);
8. Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap);
9. Ir. Ishartini (Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan);
10. Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan);
11. Frans Marganda Tambunan (Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD);
12. Sigit Muhartono (Direktur Utama PT Perikanan Indonesia); dan
13. F. Purwanto (Kuasa Direktur Utama/Direktur Operasional dan Direktur pengembangan PT Garam (Persero).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, membahas Penyesuaian RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dibuka pukul 10.35 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam APBN Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2024 oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar **Rp7.046.659.869.000,00** (tujuh triliun empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), mengalami penambahan anggaran sebesar **Rp57.104.568.000,00** (lima puluh tujuh miliar seratus empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar **Rp7.103.764.437.000,00** (tujuh triliun seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sehingga komposisi per-Eselon I menjadi sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp659.661.999.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp87.254.343.000,00 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- c. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp946.540.091.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya**, sebesar Rp1.223.170.407.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.141.397.068.000,00 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp386.899.151.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut**, sebesar Rp657.638.033.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
- h. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.471.584.111.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu rupiah); dan
- i. **Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp529.616.234.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.

2. Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran dalam pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebesar Rp986.400.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) untuk mendukung program dan kegiatan kelautan perikanan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengalokasikan anggaran dan kegiatan pembangunan Kelautan Perikanan di kawasan perbatasan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk (Kalimantan Barat), Motaain (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua) serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan, apabila terdapat perubahan alokasi anggaran yang berdampak pada kegiatan kelautan perikanan agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk dibahas serta diputuskan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151